

**MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR PANTAI DALAM
MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN [STUDI AWAL PENGEMBANGAN
DESA WISATA TERPADU BUKITBATU, KABUPATEN BENGKALIS]**

Ahmad Jamaan

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini merupakan upaya awal untuk menemukan model pengembangan kawasan pesisir pantai guna menghadapi Komunitas ASEAN yang akan efektif berlangsung pada Januari tahun 2016. Fokusnya adalah pengembangan Desa Wisata Terpadu di Kecamatan Bukitbatu, Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis. Arah pengembangan kawasan desa pesisir pantai ini diarahkan kepada komitmen yang kuat dari aktor-aktor atau agen-agen yang terlibat, negara, pemerintah (provinsi, kabupaten, desa), masyarakat, perguruan tinggi dan sektor swasta termasuk individu untuk bersatupadu saling terkoordinasi dalam sistem baku menjadikan desa ini sebagai kawasan wisata sejarah-budaya, desa wisata industri kerajinan, desa wisata perairan dan desa wisata kuliner khas Melayu.

Kata Kunci: *ASEAN, bukit batu laut, desa wisata, Melayu, komitmen, pesisir, sinergi*

PENDAHULUAN

Genderang penyatuan masyarakat di kawasan Asia Tenggara dalam sebuah institusi bernama Masyarakat ASEAN telah lama digaungkan. Tepat tanggal 1 Januari 2016, komunitas ini akan dimulai, setelah beberapa tahun sebelumnya dilakukan berbagai sinkronisasi dan penguatan dari berbagai aspek. Mulai dari kesiapan negara anggota, organisasi yang akan menyelenggarakannya, berbagai institusi yang ikut menyertainya, regulasi berbagai aspek hingga komitmen untuk menjalankan tiga pilar, yakni ekonomi sebagai motor penggerak kerjasama, politik keamanan sebagai basis terjaminnya implementasi komunitas, serta sosial budaya sebagai pilar perluasan dan implikasi adanya kehendak bersama dalam sebuah himpunan besar ASEAN.

Desa-desa di kawasan pesisir pantai adalah wilayah yang akan berhadapan langsung dengan ‘serbuan’ asing melalui kerjasama negara-negara serantau Asia Tenggara ini. Pada saat yang bersamaan pembinaan dan pengelolaan kawasan pesisir sangat minim dan cenderung terabaikan. Seolah-olah tempat tersebut hanya sekedar penghias dan pelengkap adanya sebuah institusi yang bernama negara, bukan sebagai satu kesatuan utuh.

Bagi Indonesia, telah lama pula diikrarkan bahwa negara ini telah siap menghadapi masuknya Indonesia dalam komunitas ASEAN. Dalam bahasa yang lain – siap tidak siap Indonesia akan masuk dalam arena ini. Setidaknya ada empat kelompok yang menyikapi kerjasama serantau ini. Ada sebagian kalangan, kesiapan sudah dilakukan sehingga berbagai peluang dan kesempatan dalam kerjasama komunitas ini akan dapat diperoleh secara optimal. Di sisi lain, ada sebagian kalangan ragu dengan kesiapan tersebut akibat kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi terlalu nyata. Sementara persiapan untuk menghadapinya tidak pernah dilakukan himpunan besar bernama negara, sebagai penanggungjawab utama terselenggaranya kerjasama ini. Mereka ini menawarkan perlunya digesa dan dilakukan persiapan serta penguatan secara terus menerus di segala lini.

Kelompok ketiga memandang secara skeptis bahwa Indonesia terutama masyarakat telah memiliki mekanisme adaptif yang mekanis, otomatis tanpa perlu dipersiapkan. Masyarakat akan menyesuaikan diri secara alami terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan terdekat mereka. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tanggungjawab negara kepada masyarakat seperti hilang sehingga apapun yang dilakukan negara, masyarakat hanya sebagai objek sekaligus sebagai penerima dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Walaupun masyarakat mendapatkan informasi dan akses, namun sangat terbatas sehingga apa yang akan terjadi akan di hadapi dengan pola penyesuaian alami.

Kelompok terakhir adalah mereka yang memang tidak memiliki pengetahuan dan persiapan sama sekali dengan kerjasama ini apalagi akses, informasi, dan jaringan. Kondisi ini terjadi disebabkan tidak sampainya jangkauan tangan negara dalam menjalankan fungsi, amanah dan tanggungjawabnya kepada mereka.

Persoalannya, hadirnya kerjasama mulai Masyarakat ASEAN 2016 tetap harus menjadi perhatian serius. Hal ini disebabkan ada banyak peluang dan kesempatan yang dapat diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya di masyarakat yang berada di desa-desa kawasan pesisir. Tentu adanya peluang yang kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik daripada membiarkannya sama sekali. Tidak dimungkiri bahwa kawasan pesisir pantai Indonesia terbentang panjang, namun belum dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Masyarakat kawasan pedesaan di pesisir adalah kelompok yang rentan untuk menerima dampak buruk kerjasama Masyarakat ASEAN, akibat daya saing rendah,

infrastruktur belum memadai atau belum sesuai standar, jaringan informasi terbatas, kualitas sumber daya manusia dan pendidikan dan lainnya. Tidak heran bila kemudian pesisir dan pedesaan menjadi sorotan pemerintah untuk ditingkatkan pembangunannya dikaitkan melalui otonomi yang difasilitasi dengan UU No 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Produk lain sebagai pendukung adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Di sisi lain, kawasan desa di pesisir memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan sehingga bila dikelola dengan baik maka berbagai peluang yang disediakan kerjasama Komunita ASEAN akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu, bagaimana yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan potensi desa kawasan pesisir menyambut kerjasama Masyarakat ASEAN di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis?

PROFIL KAWASAN

Salah satu kawasan di Kecamatan Bukit Batu, tepatnya di Desa Bukitbatu memiliki posisi yang khas-unik, strategis, dan indah. Khas dan unik karena desa ini berada dalam kawasan mulut muara Sungai Bukit Batu. Bila masuk dari Selat Bengkalis atau Selat Melaka, maka akan ditemui rumah-rumah panggung yang berdiri di atas air di kanan dan kiri muara sungai. Di sebelah kanan akan ditemui rumah khas Melayu peninggalan Kesultanan Siak Sriindrapura yang hingga kini oleh ahli warisnya masih dirawat dengan sangat baik. Khas karena desa ini juga merupakan daerah kekuasaan Laksamana Raja Dilaut, yang diberi mandat oleh Sultan Abdul Jalil Alamsyah, penguasa Kesultanan Siak Sriindrapura pada masa itu.

Sebagai kawasan yang strategis, desa ini berada di pesisir Pulau Sumatera yang dapat ditempuh melalui darat. Muara sungainya berhadapan langsung dengan dua selat, Melaka dan Bengkalis. Dengan demikian akses ke luar negeri, Malaysia dan Singapura atau untuk masuk ke wilayah perairan yang lebih luas seperti Samudera Hindia dan Laut Cina selatan akan mudah dilalui. Kecamatan Bukit Batu sendiri memiliki batas wilayah di sebelah utara Berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Kecil, sebelah barat dengan Kecamatan Mandau, sebelah timur dengan Kecamatan Merbau dan Bengkalis.

Wilayah ini juga dikatakan indah karena berada di tepi laut, di seberang Pulau Bengkalis sehingga pesona perairan begitu terasa di sini. Kecamatan Bukit Batu sendiri terdiri dari satu kelurahan (Sungai Pakning) yang juga merupakan ibu kota kecamatan dan 14 desa. Jarak antara Sungai Pakning dengan Kota Pekanbaru adalah 275 Km. Untuk mencapai Desa Bukit Batu dapat ditempuh dengan perjalanan darat melalui Kabupaten Siak Sriindrapura selama lebih kurang lima jam. Jalur lain dapat dilewati melalui Kota Dumai.

Mudahnya mencapai kawasan ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai baik bila dilewati melalui Kota Siak Sriindrapura atau melalui Kota Dumai. Di sini juga telah masuk sarana penerangan, dan telekomunikasi. Sebagaimana umumnya kawasan pesisir laut di Sumatera, terutama di Riau, tidak semuanya berbentuk pantai karena banyak dari daerahnya yang merupakan rawa dan ditumbuhi tanaman bakau. Namun sebagian lainnya wilayah pemerintahannya memiliki ketinggian lebih kurang 5 (lima) meter dari permukaan pantai, dengan kecenderungan permukaan tanah 90 persen datar. Namun Desa Bukit Batu hanya berada di ketinggian kurang lebih satu meter dari permukaan air laut. Oleh karena itu rumah warga berbentuk panggung.

Dalam profil Kecamatan Bukit Batu hingga Oktober tahun 2013 terungkap bahwa Kecamatan Bukit Batu dihuni oleh penduduk berjumlah 36.769 jiwa dengan komposisi 18.061 laki-laki dan 18.708 perempuan. Sedangkan luas wilayahnya mencapai 1.423 meter bujur sangkar. Dalam laporan UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bukitbatu sebagaimana dikutip RAA. Astuti (2015) tingkat pendidikan warga cukup bervariasi. Sebanyak 8.859 tamat SLTA, 8.746 tamat SD, sebanyak 4.671 tamat SLTP, tamat akademi sebanyak 684, tamat perguruan tinggi (strata-1) 585 dan sarjana 21 orang. Mayoritas pekerjaan penduduk Kecamatan Bukitbatu adalah petani dan pekebun (53 persen), PNS (19 persen), akomodasi dan jasa (13 persen), pedagang (7 persen) dan nelayan (6 persen).

Merujuk kepada kondisi ini terlihat bahwa masyarakat Kecamatan Bukitbatu sangat bergantung kepada kehidupan dengan pekerjaan yang berbasis kepada pertanian dan perkebunan. Persoalannya adalah sektor pertanian dan perkebunan di kecamatan ini juga dipengaruhi oleh musim dan hanya memiliki produk pertama saat panen. Sementara produk turunan pasca panen belum dikembangkan secara luas sehingga nilai tambah dari produk pertanian dan perkebunan menjadi rendah, seiring dengan rendahnya tingkat perolehan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pekebun dibandingkan bila mereka melakukan *up grading* terhadap produk mereka tersebut. Di sisi lain, ada potensi industri kreatif di bidang pariwisata yang tidak menjadi perhatian baik oleh pemerintah maupun warga setempat. Hal ini merujuk kepada ada desa di kecamatan ini yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan dari aspek bidang usaha ini, sembari meningkatkan profesi yang sudah ada di sini yakni sektor akomodasi dan jasa.

ANTARA ANCAMAN DAN PELUANG

Sebagai daerah berbatasan langsung dengan wilayah perairan dan negara tetangga, Kecamatan Bukitbatu memiliki potensi ancaman yang besar dari aspek keamanan, bila dibandingkan dengan dua pilar Komunitas ASEAN lainnya yaitu ekonomi dan sosial budaya. Hal ini disebabkan karena halaman perairan kawasan Bukitbatu yang langsung berhadapan dengan perairan internasional akan rentan

terhadap masuknya berbagai potensi yang mengundang rawannya keamanan baik tradisional maupun non tradisional.

Selat Melaka adalah jalur pelayaran dunia tersibuk kedua. Setiap bulan alur transportasi ini dilalui lebih kurang 5.000 kapal (Dorojatun Kuncorodjakti, 2015). Merujuk kepada kompilasi Nippon Maritime Center dari data Departemen Maritime Malaysia, Selat Melaka dilayari kapal barang dengan bobot di atas 300 GT mendekati 80.000 tahun 2013. Sebagiannya merupakan pengangkut bahan energi dunia dari Eropa dan Timur Tengah untuk diantar menuju ke Asia Timur. Perputaran uang per tahun di selat ini antara 84 miliar hingga 250 miliar dolar AS. (Muhammad Amin, 2014).

Dalam kondisi seperti ini, tidak heran bila kawasan Selat Melaka, merupakan wilayah di mana potensi tindak kriminal dan gangguan keamanan menjadi besar. Misalnya kejahatan lingkungan berupa pembuangan limbah cair, perdagangan lintas batas secara ilegal, imigran gelap, termasuk kegiatan perompakan yang dilakukan secara tradisional ataupun dengan modus lebih terkesan ‘logis dan intelektual’. Untuk kasus pelaporan terjadinya perompakan ‘tradisional’ – setiap perbuatan kekerasan yang melawan hukum dilakukan sekelompok orang dari suatu kapal tertentu terhadap kapal lainnya di laut bebas dengan tujuan mengambil alih barang berharga secara tidak sah (Rahman Fajriansah, 2007) - cenderung lamban mendapat penanganan dari institusi terkait, baik oleh negara pantai seperti Singapura dan Malaysia, International Maritime Bureau (IMB), International Maritime Organization (IMO) dan juga pihak kepolisian (Muhammad Amin [Ed], 2014).

Walaupun tidak semua laporan merupakan tindak perompakan konvensional langsung di kapal yang tengah berlayar, bahkan ‘perompakan’ dengan cara lebih canggih melalui motif menebus asuransi. Seperti laporan perompakan kapal versi IBM sejak tahun 2003-2005 yang menyatakan kawasan Indonesia di Selat Melaka sebagai perairan paling berbahaya di dunia. Padahal ternyata ujungnya adalah perang opini untuk meningkatkan nilai bayar premi asuransi pelayaran lebih tinggi untuk kapal-kapal yang melewati rute ini (Rahman Fajriansah, 2007).

Melalui jalur ini terjadi penyeludupan barang dan orang. Selain itu melalui pelayaran internasional ini pula kerap tertangkap perdagangan orang (human trafficking), transit obat-obat terlarang atau Narkoba, bahkan senjata. Persinggungan wilayah perairan dengan negara lain, juga membuka peluang konflik silangpendapat antara *coastal state*, Indonesia, Malaysia dan Singapura, walaupun kemudian ini dapat diselesaikan dengan cara kooperatif (Ahmad Jamaan, 2010).

Inilah beberapa tantangan yang dihadapi kawasan pesisir Riau yang wilayahnya beririsan dengan alur transportasi di mana berbagai kepentingan negara-negara industri maju dan besar akan mencoba mempertahankan kepentingan maritimnya. Secara umum ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh kawasan maritim Indonesia. Pertama, pelayan perairan Indonesia tidak dikelola dengan tata

kemaritiman yang baik, tidak tersistem sehingga terjadi tumpang tindih. Kedua, ada ketidaksesuaian dengan undang-undang dan konvensi internasional terkait. Ketiga, dalam penegakan hukum tidak memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang undang-undang maritim, administrasi maritim, manajemen penegakan hukum, keamanan dan keselamatan maritim, serta perlindungan lingkungan laut). Oleh karena itu diperlukan tertib hukum, administrasi dan operasional kemaritiman untuk memperkuat ekonomi nasional (Henky Supit, 2004).

Dalam tiga pilar kerjasama Komunitas ASEAN adalah ekonomi, politik-keamanan serta sosial-budaya, pada hakekatnya merupakan jalinan kerjasama negara-negara anggota ASEAN untuk menjadikan potensi yang dimiliki anggota-anggotanya menjadi lebih besar, lalu berkembang secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui kerjasama ini pula berbagai potensi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas dapat diprediksi untuk selanjutnya ditekan agar tidak menjadi kenyataan. Sebagai kawasan yang berada dalam jalur Selat Melaka, Kecamatan Bukit Batu berpotensi untuk mendapat imbas dari berbagai tindak kejahatan perairan, namun dengan menjadikan kawasan ini sebagai desa wisata terpadu, maka potensi ancaman keamanan dan kerawanan lainnya berpeluang besar untuk dapat dieliminir untuk tidak langsung masuk ke kawasan ini..

Mengembangkan desa wisata adalah untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus menambah pendapatan asli daerah (PAD). Semakin maju desa wisata maka akan menumbuhkan harapan terhadap tumbuhnya bisnis biro perjalanan baru, transportasi, *homestay* dan lainnya. Saat ini ada ratusan bahkan mungkin ribuan desa wisata di Indonesia dan telah berhasil mengangkat taraf hidup ekonomi masyarakatnya. Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul (<http://desawisatabejiharjo.net/profil-pengelola-goa-pindul>), berada di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul adalah contohnya. Keunikan desa ini akibat berasal dari ketersediaan air bersih bawah tanah yang muncul ke permukaan sepanjang tahun. Selain itu masyarakat menawarkan wisata budaya, sejarah dan pendidikan, seperti situs Purbakala Sokoliman, sentra kerajinan Blangkon, serta Wayang Beber. Desa ini juga memiliki monumen pengeboman Belanda karena Bejiharjo merupakan salah satu rute gerilya Panglima Besar Jendral Soedirman. Di desa ini ada 12 gua alami sebagai objek wisata dan pendidikan.

Desa Gabungan yang berada di Kecamatan Turi, Sleman di bawah kaki Gunung Merapi (<http://www.desawisatagabungan.com/p/profil.html>), masyarakatnya menjual potensi nilai-nilai tradisi Jawa dengan kehidupan di alam pegunungan yang nyaman dan sejuk. Desa menonjolkan suasana alam dan seni budaya juga ada di Sari Bunih Ayu (<http://www.desawisata-saribunihayu.com/>). Lain lagi dengan Dusun Kreet, Senadangsari, Pajangan, Kabupaten Bantul yang mengembangkan kekhasan kerajinan batik kayu (<http://swa.co.id/business-strategy/management/desa-wisata-kreet>). Sebagian besararganya pembatik dan kayu, bambo dan kulit sebagai media. Produk

yang dihasilkan beraneka ragam, mulai dari tempat tisu, lemari, meja, patung, topeng, dan hewan-hewan. Ada pula Desa Nglanggeran dalam bidang ekowisata, dimulai tahun 1999, baru pada 2008 berkembang setelah pemuda setempat menggerakkannya. Sebelumnya, masyarakat bekerja mencari batu dan kayu. (<http://swa.co.id/entrepreneur/sugeng-handoko-pelopor-desa-ekowisata-beromset-miliaran>)

Mengingat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, maka sejumlah pemerintah daerah berlomba-lomba untuk membangun desa wisata. Seperti dilakukan Provinsi Bali yang berazam untuk memiliki 100 desa wisata di tahun 2018. Saat ini saja Bali memiliki 24 desa wisata yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Di 2015, ada 11 desa wisata baru yang mendapat pembinaan. Setiap desa di kabupaten/kota di Bali memiliki ciri khas untuk dijual sehingga setiap desa bisa ikut menikmati dampak kegiatan pariwisata sehingga perekonomian desa akan semakin terangkat, (<http://swa.co.id/business-strategy/management/2018-bali-ingin-punya-100-desawisata>). Pemerintah, selain untuk masyarakat juga melakukan pembinaan dan pelatihan untuk perangkat desa sembari mempersiapkan infrastruktur.

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Desa Wisata merupakan sebuah kawasan di mana di dalamnya terjadi integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, Wiendu. 1993). Desa wisata memiliki dua komponen yakni akomodasi dan atraksi. Akomodasi merupakan pendukung agar wisatawan dapat bertahan dengan kecenderungan menggunakan rumah warga setempat dan atau bangunan yang tumbuh dalam konsep rumah penduduk. Sedangkan atraksi atau pagelaran merupakan berbagai aktivitas rutin sehari-hari masyarakatnya berikut letak desa yang memungkinkan berintegrasinya pengunjung untuk berpartisipasi aktif seperti bejar menari, menenun, melukis, mengukir, merangkai, dan banyak lagi. Dalam pandangan lain Edward Inskeep menilai wisata desa merupakan tempat sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan di sana.

Hanya saja pendekatan pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan semula jadi guna menghindari berbagai efek negatif yang timbul, setidaknya efek tersebut dapat dikendalikan. Misalnya pendekatan pasar melalui interaksi tidak langsung, seperti dirilis oleh World Tourism Organization dan United Nation Development Programme menyebutkan desa mendapat manfaat tanpa harus berhubungan langsung dengan pengunjung. Model ini bisa dalam bentuk penulisan buku, kehidupan desa, seni dan budaya lokal, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya.

Ada pula model setengah langsung (kombinasi) seperti kunjungan pelancong sehari sembari makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian pengunjung kembali ke tempat penginapannya dan tidak tinggal di rumah warga. Ada pula model langsung, ketika akses pengunjung bisa sampai ke dalam rumah warga untuk menginap (UNDP and WTO, 1981). Dapat juga dilakukan dengan kombinasi lain.

Untuk mengembangkan desa wisata diperlukan beberapa karakteristik pendukung seperti adanya atraksi atau aktivitas yang akan menjadi andalan untuk dilihat atau dipelajari oleh pengunjung. Jarak tempuh juga menjadi hal yang penting selain karakteristik wilayah, luas desa dan jumlah penduduk. Faktor lain adalah terkait dengan sistem kepercayaan dan kemasyarakatan sebagai ciri khusus dan akar budaya yang dipertahankan dan dipelihara masyarakat setempat, Demikian pula dengan agama yang dianut mayoritas penduduk. Hal yang menjadi penopang lainnya adalah ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, dan telepon sehingga dapat dianalisa apakah suatu desa akan menjadi kawasan wisata dengan model perhentian sejenak, kunjungan sehari atau model menginap di rumah warga.

Persoalannya saat ini Indonesia masih ketinggalan dalam hal pengembangan industri pariwisata dibandingkan negara-negara tetangga. (<http://swa.co.id/business-strategy/management/konsep-ovop-tak-efektif-bangun-desa-wisata>). Dasarnya pengembangan obyek wisata baru yang sedikit, walaupun obyek wisata yang alami memiliki kondisi bagus. Konsep *One Village One Product* (OVOP) untuk pembangunan desa wisata dinilai tidak ekonomis sehingga tidak memerlukan strategi *brand* dan promosi khusus.

Konsep OVOP berasal dari Oita, Jepang dan diadopsi banyak negara seperti Thailand dan Indonesia. Penerapan konsep ini berdasarkan program membangun suatu kawasan tingkat desa atau, kecamatan, kota kemudian masyarakatnya memilih sebuah produk unggulan yang akan mereka hasilkan. Oleh karena itu sumber daya lokal dan pemanfaatan kearifan budaya setempat akan memberikan nilai tambah bagi produk yang akan dihasilkan. Bentuknya kerajinan tangan, karya seni dan budaya.

Hanya saja untuk mewujudkannya pemerintah mesti bersinergi dengan swasta (<http://swa.co.id/business-strategy/management/sinergi-pemerintah-swasta-kembangkan-desa-wisata>). Desa Wisata jauh lebih berkelanjutan daripada pariwisata yang bersifat *mass tourism*, seperti wisata pantai, gunung, dan lainnya. Kerjasama swasta dan pemerintah itu harus melibatkan masyarakat lokal, karena selama ini mereka hanya menjadi penonton dan tak mendapat apa-apa. Akibatnya kegiatan pariwisata dirasakan bukan bagian dari mereka.

Pemerintah memiliki kewajiban membangun infrastruktur agar wisatawan nyaman menuju ke tempat tujuan. Setelah itu pemerintah juga berinteraksi dengan komunitas setempat dan juga swasta yang bergerak dalam bidang agen perjalanan, hotel, restoran, dan lainnya. Dengan demikian pemerintah berperan dari aspek

penjualan, menyediakan infrastruktur termasuk lahan parkir, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Infrastruktur menjadi kendala utama pengembangan pariwisata Indonesia, karena jalan, listrik, dan air adalah sarana membuat pengunjung nyaman karena terkait kualitas tempat tujuan wisata. Kebersihan dan pelayanan yang ramah penduduk merupakan nilai penting untuk meningkatkan kedatangan turis, termasuk keamanan (<http://swa.co.id/business-strategy/management/bangun-pariwisata-infrastruktur-harus-mendukung>).

Oleh karena itu sinergi harus menjadi hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Dinergi misalnya terlihat dalam pola sederhana yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor asing. Desa Wisata Kalibiru yang dikelola kelompok tani mampu menarik pengunjung rata-rata 200 orang per hari, dan di akhir pekan mencapai ribuan orang. (<http://swa.co.id/business-strategy/marketing/desa-wisata-kalibiru-bisnis-sampingan-petani-kulonprogo>). Desa ini secara rutin telah menjadi tempat studi banding kelompok tani berbasis kehutanan dari seluruh wilayah Indonesia. Kelompok tani mengolah lahan seluas 29 hektar ini dan sukses menjadikannya sebagai objek wisata. Setiap pekan selalu ada kunjungan dari kelompok tani pengelola kawasan hutan. Awalnya para petani didampingi LSM lalu kemudian masyarakat bergerak sendiri sambil dibantu dana dari PNPM Pariwisata yang bisa digunakan untuk membangun fasilitas.

Sinergi juga terlihat, misalnya dalam kegiatan yang diselenggarakan PT Telkom mengembangkan Marketplace Desa Wisata yang dapat diakses *online* dari seluruh dunia (<http://swa.co.id/business-strategy/management/dukung-desa-wisata-telkom-kembangkan-marketplace>). Telkom membawa Via.com sebagai partner yang fokus pada industri travel dan telah menjadi agen wisata terbesar di Asia yang bergerak dalam bisnis travel online. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki jaringan kemitraan bersama 20.000 agen wisata yang tersebar di India, Philipina, Indonesia, Brazil, Afrika Selatan, Singapura dan Korea Selatan. Kerjasama ini memudahkan komunitas dalam ekosistem desa wisata terhubung dan saling memberikan berkontribusi.

Bagaimana dengan Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Riau. Dapatkah dikelola menjadi desa wisata seperti desa-desa wisata yang telah ada di Indonesia? Bagaimana polanya? Apa saja potensinya? Bila melihat kondisi alam, warisan sejarah serta kreativitas masyarakat yang dimiliki desa ini, maka terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan di atas. Lihat saja lingkungan sekitarnya yang berbatasan dengan Selat Melaka dan Selat Bengkalis, merupakan potensi wisata perairan yang dapat dikembangkan bila seluruh komponen bersatu padu untuk menggerakkannya.

Walaupun demikian, bila melihat posisi bangunan rumah warga tentu memerlukan penanganan yang lebih baik, karena struktur dan *landscape* perumahan

di desa ini tidak tertata dengan rapi. Semakin rapi dan indah kawasan pemukiman warga akan semakin mudah pula untuk memancing kedatangan wisatawan ke daerah ini.

Pembentukan desa wisata terpadu di Desa Bukitbatu sebenarnya berpotensi besar untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Apa lagi mengingat letak strategisnya maka pengembangan statusnya akan bisa menjadi salah satu *buffer zone*, kawasan penyanggah untuk mengantisipasi potensi terancam dari aspek politik dan keamanan perairan. Pengembangan potensi sejarah dan budaya di desa ini akan berdaya guna untuk memperoleh benefit ekonomi sehingga sejalan dengan pilar Komunitas ASEAN.

Sebenarnya Riau dan Kepulauan Riau memiliki sejumlah kawasan pesisir pantai yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Pulau Penyengat misalnya yang bukan saja memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, akan tetapi juga menjadi pusat pengembangan agama Islam, bahasa Melayu, panganan. Namun kawasan perairan Pulau Penyengat bukan jalur pelayaran internasional. Selain Pulau Ruptat misalnya, berbatasan langsung dengan Malaysia karena hanya dipisahkan dengan Selat Melaka sebagai jalur pelayaran internasional, memiliki pasir pantai yang putih, bersih, indah namun memiliki akses terbatas untuk mencapainya.

Sebagai kawasan yang memiliki letak strategis - ditunjukkan dengan mudahnya akses transportasi darat, berbatasan langsung dengan Selat Melaka dan Selat Bengkalis sehingga jalur mudah dijangkau melalui perairan- Kecamatan Bukit Batu memiliki potensi yang dapat ditingkatkan. Tujuannya untuk memperluas perolehan keuntungan dalam penyatuan kawasan ASEAN sebagai komunitas bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tidak banyak kawasan pesisir yang memiliki infrastruktur memadai seperti ini, namun tidak dapat dikembangkan bila tidak ada dorongan kuat melalui *political will* dan *political action* pemerintah Indonesia (minimal pemerintah provinsi dan kabupaten) untuk mengintervensi dan ‘memaksa’ kelompok kepentingan lainnya terlibat bersama menggarap kawasan ini. Misalnya, perbaikan infrastruktur yang telah ada, bukan hanya sekedar untuk dapat didatangi, akan tetapi juga harus layak wisatawan mulai dengan keamanan jalan masuk desa (pagar jalan yang belum ada) lebar jalan yang belum memadai serta penerangan jalan.

PENGEMBANGAN DESA WISATA SEJARAH

Hampir sebagian besar rakyat Indonesia pasti pernah mendengar lagu Iyeth Bustami “Datuk Laksamana Raja di Laut”. Datuk Laksamana merupakan gelar sekaligus titah dari Kerajaan Siak untuk menjaga keamanan di pesisir pulau berbatasan dengan selat Malaka ini. Catatan sejarah menunjukkan Datuk/Encik Ibrahim merupakan Datuk Laksamana Raja Di Laut I yang berkuasa pada tahun 1767

M-1807 M. Ada empat datuk yang memerintah di Bukit Batu, tiga penerusnya adalah Datuk Khamis, Datuk Abdullah Shaleh dan Datuk Ali Akbar. Mereka diberi gelar Datuk Laksamana II sampai IV.

Rumah Datuk Laksamana Dilaut IV, Datuk Ali Akbar terletak Di Desa Bukit Batu, sekitar 35 kilometer dari Kota Sungai Pakning. Rumah peninggalan ini berbentuk panggung. Sekilas terlihat seperti rumah adat/ rumah tradisi di Kepulauan Riau. Berbentuk panggung dengan motif-motif Melayu di beberapa ornamen bangunannya. Ada sejumlah mitos yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan sejarah rumah kediaman bersejarah yang masih terpelihara dengan baik ini. Cerita dan sejarah yang ada di dalamnya menjadi salah satu penarik minat untuk mendatangnya.

Tidak jauh dari rumah ini juga terdapat makam Datuk Laksamana Raja Di Laut. Di kawasan pemakaman tersebut terlihat dua makam datuk penguasa laut, Datuk Laksamana III dan Datuk Laksamana IV. Kedua makam ini terletak di belakang Masjid Jami' Al Haq, masjid tua peninggalan keduanya.

Aspek sejarah ini begitu penting ditanamkan kepada generasi muda, namun akan diminati oleh pengunjung bila mendapat kemasan yang lebih atraktif. Misalnya melalui penyediaan dan pembuatan buku sejarah Laksamana Raja Dilaut, membuat komik perjalanan dan perjuangannya termasuk menyajikan dalam bentuk kartun animasi. Melalui pola ini tentu akan lebih mudah untuk memperkenalkan kawasan bersejarah ini kepada masyarakat luar hingga manca negara.

Di Desa Bukit Batu sendiri, terutama Desa Bukit Batu Laut, terdapat pula rumah peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kondisi bangunannya sangat terpelihara karena ahli warisnya telah melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala.

PENGEMBANGAN DESA WISATA KERAJINAN

Desa Bukit Batu Laut memiliki daya dukung kuat untuk dikembangkan menjadi desa wisata mengingat sebagian besar perempuan yang berstatus ibu rumah tangga memiliki keterampilan untuk menenun songket khas Melayu. Ibu rumah tangga yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangganya di pagi dan siang hari akan pergi ke ruangan khusus di belakang rumah masing-masing di mana Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) telah siap untuk digerakkan. Melalui perubahan status desa menjadi desa wisata maka potensi kreativitas kaumperempuan di desa ini akan dapat ditingkatkan selain juga akan mampu meningkatkan sumber penghasilan keluarga. Ini adalah bentuk nyata dari penguatan dan pemberdayaan kaum perempuan desa. Ibu rumah tangga di desa ini sangat produktif karena waktu luang mereka selalu

diisi dengan kegiatan keterampilan rumah tangga yang menghasilkan cendera mata bernilai jual tinggi juga falsafah bercorak budaya khas Melayu.

Pengembangan industri rumah tenun songket Melaku ini akan memiliki nilai jual tinggi bila ada peningkatan kualitas pembuatan, sarana serta kapasitas yang ditingkatkan. Sentuhan teknologi sederhana memungkinkan tergantikannya tenaga manusia menjadi tenaga dinamo (listrik) minimal untuk menggerakkan peralatan, bukan dalam penentuan motif (semi manual). Saat ini kondisi ruangan ATBM untuk menenun perlu mendapatkan perhatian untuk ditata sebagai bagian dari proses pembuatan produk termasuk di sain tenunan, pemasaran dan sentra penjualan hasil tenunan, pembuatan dan pembuatan kemasan kain songket hasil tenunan. Harga songket dengan motif tertentu tergantung kepada tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan.

Untuk penjualan ke konsumen yang langsung datang ke rumah masyarakat biasanya harga sebuah songket antara Rp400.000 s.d Rp800.000. Akan tetapi harga ini akan meningkat apa bila diberi sentuhan teknologi kemasan, pelatihan produk akhir yang menjamin mutu promosi agar dapat masuk ke pasar ASEAN menjadi Rp1,5 juta s.d Rp2,5 juta. Dengan demikian, berdasarkan selisih harga yang dapat dihasilkan, maka pendapatan masyarakat perajin akan semakin meningkat jika dibandingkan dengan hasil yang mereka dapatkan selama ini.

PENGEMBANGAN DESA WISATA PERAIRAN

Desa Bukit Batu Laut yang terletak di tepi selat Bengkalis dan berbatasan pula dengan Selat Melaka secara langsung berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata perairan. Gelombang yang kecil dan angin yang sepoi-sepoi membuat kawasan perairan ini semakin mudah untuk dikembangkan menjadi daerah kunjungan wisata khusus perairan. Persoalannya, daya dukung untuk menjadikannya sebagai kawasan desa wisata perairan haruslah mendapat dukungan yang besar dari berbagai kalangan, terutamanya pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten bahkan desa yang telah memiliki anggaran sendiri untuk pembangunan.

PENGEMBANGAN DESA WISATA KULINER

Telah menjadi kebiasaan di sebuah kawasan perairan terutama bagi masyarakat yang melakukan pekerjaan sebagai nelayan untuk meningkatkan nilai hasil laut menjadi bahan olahan. Sama dengan produk-produk perkebunan dan pertanian serta lainnya bahwa nilai barang mentah akan lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai produk setengah jadi atau barang jadi. Dengan adanya *upgrading* produk maka hasil tangkapan laut akan mendatangkan keuntungan lebih besar juga akan lebih tahan lama. Misalnya mengolah hasil tangkapan laut menjadi kerupuk, tepung, bakso, nuget, dan bentuk lainnya yang lebih kreatif.

Merujuk kepada kondisi objektif Desa Bukit Batu ini maka dapat disimpulkan bahwa desa ini memiliki nilai jual yang tinggi untuk mendatangkan wisatawan sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat dapat diwujudkan. Model yang tepat untuk pengembangan kawasan pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka ini adalah *top down*, pengembangan Desa Wisata Terpadu di mana di dalamnya terdapat integrasi langsung berbagai kegiatan masyarakat dan alam, ditopang dengan interaksi langsung antara masyarakat setempat dengan pengunjung. Namun pengembangan Desa Wisata Terpadu ini harus mendapatkan intervensi dari pemerintah yang mengikutsertakan sektor swasta untuk memformulasikan kebijakan agar sesuai dengan tindakan serta memfasilitasi ketersediaan infrastruktur yang belum terpenuhi.

Pemerintah melalui perannya sebagai inisiator dapat memfasilitasi bersama pihak perguruan tinggi dan sektor swasta bersama menginisiasi pembentukan kelompok sadar wisata. Kelompok ini berhimpun agar memiliki kemauan untuk mengolah dan mengembangkan desanya menjadi desa tujuan wisata.

Dalam aktivitas lainnya, pemerintah bersama perguruan tinggi dan sektor swasta berinisiatif untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan kepada masyarakat desa setempat tentang pelayanan, keramahan kepada wisatawan, serta menyiapkan tenaga-tenaga terampil untuk mengembangkan berbagai produk lokal yang belum terekspos, mengembangkan produk-produk yang telah ada serta mempromosikan produk-produk tersebut secara khusus melalui pemasaran yang atraktif. Pemerintah juga memfokuskan desa ini sebagai destinasi kawasan singgah menginap, bukan sekedar kawasan kunjung lepas. Dengan demikian diperlukan rumah sewa yang disiapkan oleh masyarakat.

Adanya penyewaan kamar-kamar di rumah-rumah penduduk ini tentu melalui perubahan karakter dan sosialisasi lintas budaya mengingat pengunjung yang akan datang akan memiliki karakter yang berbeda sama sekali dengan kebiasaan masyarakat setempat. Diperlukannya kamar sewa untuk wisatawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan yang menopangnya berupa pelatihan kepada wisatawan untuk menenun di rumah-rumah warga yang memiliki ATBM langsung oleh pekerjanya.

Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang cara dan gaya hidup sehat dan bersih di setiap rumah warga dan sarana umum seperti kamar mandi, gerai makanan dan minuman, tempat parkir, jalan akses masuk kawasan serta gerai pemasaran bersama. Kelompok sadar wisata atau mungkin juga karang taruna setempat dapat mengelola kegiatan terintegrasi ini agar masyarakatnya dapat menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan demikian masyarakat desa wisata akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka urbanisasi dan pengangguran.

Pemerintah dapat memfasilitas terselenggaranya pembuatan dan pemeliharaan web wisata terpadu, penelitian dan pameran produk kuliner lokal, memperluas promosi dalam bentuk brosur dan kalender. Dengan demikian ada keterpaduan antara tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan kebijakan intervensi pemerintah. Keterpaduan kawasan desa wisata ini bukan hanya dilihat dari program kegiatannya akan tetapi juga terpadu teknologi pendukungnya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas jalan akses melalui pelebaran dan standar keamanan dan kenyamanan. Diperlukan jaminan ketersediaan penerangan misalnya menggunakan teknologi *solar cell*, listrik tenaga angin atau tenaga gelombang yang berpotensi untuk digali dari desa ini.

Dari aspek promosi, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk membuat bangunan gerai pemasaran bersama sekaligus akan menjadi pusat promosi dan informasi wisata di desa tersebut. Dari aspek kesehatan dan kebersihan, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui pembuatan ‘*septic tank* terpadu’, yang juga berpotensi untuk menjadi energi alternatif selain juga akan menjadikan kawasan ini lebih bersih, indah, sehat, dan rapi.

PENUTUP

Proses menjadikan desa nelayan dan sejarah menjadi desa wisata mandiri di Bukit Batu ini walaupun memiliki begitu banyak peluang dan harapan, akan tetapi pada saat bersamaan juga menemui banyak tantangan. Oleh karena itu diperlu kolaborasi, *partnership*, sinergi antara *stakeholder* untuk jangka panjang, secara komprehensif, menyeluruh, terpadu. Negara, dalam hal ini pemerintah di semua tingkatannya harus melihat potensi ini dan memaksimalkan peluangnya melalui intervensi positif. Pemerintah dengan kepeduliannya membangun citra, meningkatkan daya saing, yang akan mampu meningkatkan keamanan kawasan dan stabilitas ekonomi masyarakat setempat.

Pemerintah pusat hingga daerah berkewajiban melakukan intervensi mengingat kawasan ini merupakan jalur yang bersinggungan dengan perairan internasional, dilalui oleh pelayaran terpadat di dunia. Kawasan ini memiliki potensi konflik keamanan, konflik kepentingan ekonomi, politik ideologi, karena ada campur tangan negara-negara besar di perairan Selat Melaka.

Melalui intervensi, diharapkan *output* berupa ketahanan nasional dan wilayah teritorial, keterikatan daerah terhadap kepedulian pemerintah, meningkatkan rasa nasionalisme, jaminan rasa aman untuk beraktivitas, berusaha, berlangsungnya fungsi kontrol, pembinaan dan fasilitasi terselenggara oleh pemerintah. Keberadaan negara terasa oleh masyarakat daerah secara langsung. Melalui intervensi positif pula maka akan dihasilkan *outcome* berupa terciptanya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi,

daya saing daerah menghadapi persaingan di kawasan Asia Tenggara dalam himpunan Masyarakat ASEAN.

Kebijakan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan kepada seluruh aktor atau agen-agen yang selama ini terbukti mampu bergerak bersama untuk meningkatkan potensi dan peluang pariwisata menjadi nyata, termasuk masyarakat dan individu-individu masyarakat yang akan menjadi ujung tombak dan bergerak secara langsung di lapangan dalam upaya merealisasi tujuan pengembangan desa eisata tersebut..



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamaan, 2010., *Konflik dan Kerjasama dalam Politik Internasional*, Unri Press, Pekanbaru
- Dorojatun Kuncorojakti, 2015., dalam acara di TVRI bertajuk “Kabinet Menjawab” tanggal 7 November.
- Henky Supit, 2004., *Teropong Tata Kajian Kelautan Indonesia*, Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia, Jakarta
- Inskeep, Edward., *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach* (tak bertahun)
- Muhammad Amin (Ed), 2014., *Teror Lanun Selat Melaka: Kumpulan Karya Jurnalistik Rida Award 2014*, Yayasan Sagang, Pekanbaru
- Nuryanti, Wiendu., 1993. *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahman Fajriansah, 2007., *Perompakan Kapal di Indonesia: Fakta atau Konspirasi Opini?*, Java Pustaka Media Utama, Jakarta
- UNDP and WTO., 1981. *Tourism Development Plan for Nusa Tenggara, Indonesia*, Madrid: World Tourism Organization
- <<http://swa.co.id/business-strategy/management/bangun-pariwisata-infrastruktur-harus-mendukung>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]
- <<http://desawisatabejiharjo.net/profil-pengelola-goa-pindul>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]
- <<http://swa.co.id/business-strategy/management/2018-bali-ingin-punya-100-desa-wisata>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]

- <<http://swa.co.id/business-strategy/management/dukung-desa-wisata-telkom-kembangkan-marketplace>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]
- <<http://swa.co.id/business-strategy/management/konsep-ovop-tak-efektif-bangun-desa-wisata>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]
- <<http://swa.co.id/business-strategy/marketing/desa-wisata-kalibiru-bisnis-sampingan-petani-kulonprogo>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]
- <<http://swa.co.id/entrepreneur/sugeng-handoko-pelopor-desa-ekowisata-beromset-miliaran>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]
- <<http://www.desawisatagabungan.com/p/profil.html>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]
- <<http://www.desawisata-saribunihayu.com>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]
- <http://swa.co.id/business-strategy/management/desa-wisata-krebet>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]
- <http://swa.co.id/business-strategy/management/sinergi-pemerintah-swasta-kembangkan-desa-wisata>>, [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015]